



# SOSIOLOGI PEMERINTAHAN



**Bambang kurniawan**  
**Hp. 0815 868 90917**  
**Email: [bengsq.0701@gmail.com](mailto:bengsq.0701@gmail.com)**

# Rekomendasi Buku

1. I Nyoman sumaryadi; 2010 : Sosiologi Pemerintahan
2. Talizi Ndraha; 2005; Kybernologi Ilmu Pemerintahan Jilid 1 dan 2
3. Riant Nugroho-2003; Reinventing Pembangunan, Jakarta, Elex Media Komputindo
4. Administrasi Pembangunan oleh : Sondang P. Siagian
5. Peter Schroder-2008; Strategi Politik, Jakarta, Fur die Freiheit.
6. Miriam Budiardjo-2007; Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia.
7. Manajemen Pembangunan di Dunia Ketiga : Louis G. White dan Corally Bryant.

# Pengertian

## Sosiologi :

Merupakan kenyataan sosial sekaligus gejala sosial, dan bukan hanya sekedar penjumlahan individu, melainkan suatu sistem yang dibangun oleh sebuah hubungan/interaksi diantara mereka.

(Auguste comte) ***the study of human society***, termasuk didalamnya adalah tentang gejala sosial dalam ruang lingkup pemerintahan. Atau yg dsb sbg Gejala Pemerintahan.

# Gejala Pemerintahan :

Proses penyediaan (pemenuhan) kebutuhan pihak yang diperintah akan **jasa publik** yang tidak diprivatisasikan atau **layanan civil** kepada setiap orang. Selalu menyangkut dua belah pihak, yaitu : pemerintah (dgn authoritynya) dgn yang diperintah (dgn tuntutanannya).

# Pemerintahan



Pemerintahan : Kybernian (greek); Government (prancis); Gobierno (spanyol); Governo (itali); Gosudarstuo (rusia); Regering (belanda)



Dalam 2 arti :

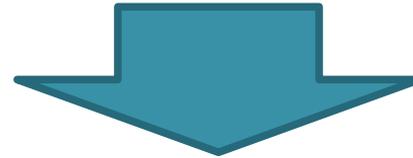
1. ARTI LUAS : Seluruh Stake Holder + trias politica
2. ARTI SEMPIT : Executive / birokrasi.

# Sosiologi Pemerintahan

- Suatu masalah atau gejala pemerintahan dipelajari oleh sosiologi, berarti masalah tersebut dikaji menurut pendekatan sosiologika.
- Contoh: Studi tentang Pemerintahan Desa setelah berlakunya UU No.22/99 kini 23/2014 dapat dilakukan dgn menggunakan konsep-konsep sosiologi. Kajiannya adlh mengenai karakteristik masyarakat desa dan lembaga2 adat yg melingkupinya.

# Sosiologi Pemerintahan

1. LEGITIMASI SOSIAL
2. REPRESENTATIVENESS
3. PARTISIPASI MASYARAKAT
4. KERJASAMA (HARMONI DAN INTEGRASI)



OBJEK FORMAL  
(PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT AKAN JASA  
PUBLIK DAN LAYANAN SIPIL SEBAGAI KEWAJIBAN  
PEMERINTAH)

# Sosiologi Pemerintahan.....

- Governance Sociology has been defined as the study of power and authority relation as these are structured at relatively inclusive level of social organization and as these influence and are influenced by the social bonds of kinship, religion,<sup>11</sup> class, interest groups of various kinds, and by shared beliefs and values. [wasburn, 1982,125]





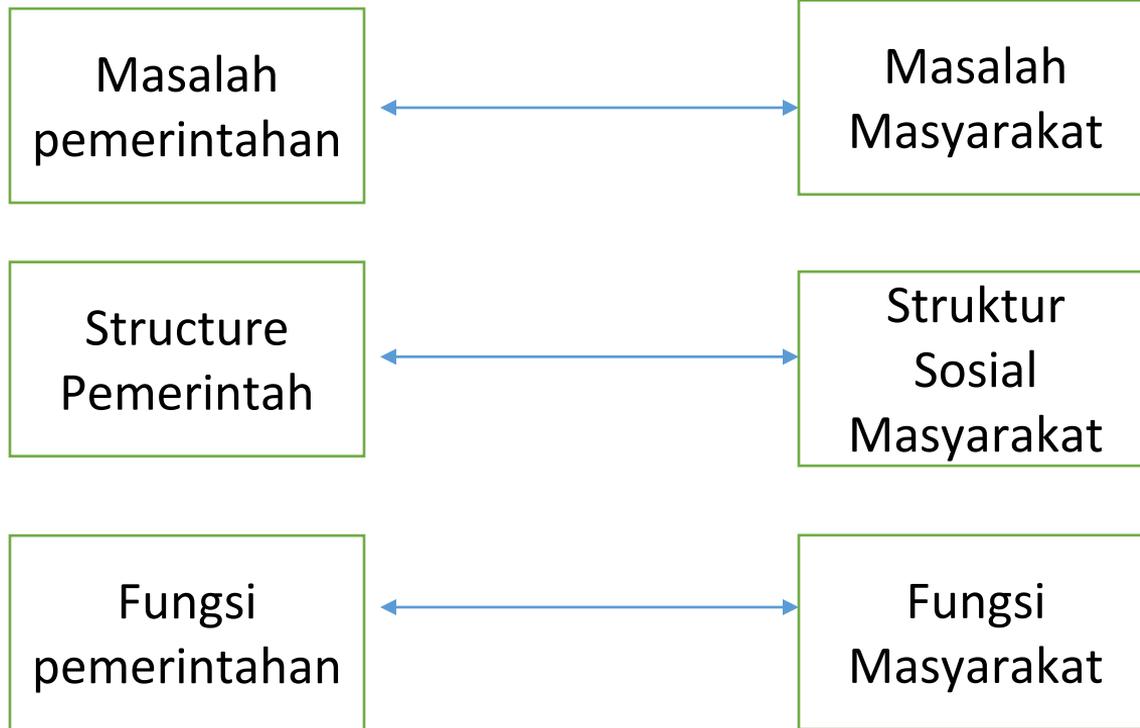
# Sosiologi Pemerintahan

Adalah kajian mengenai kaitan antara masalah-masalah pemerintahan dan masyarakat, antara struktur sosial / masyarakat dan struktur pemerintahan atau antara fungsi pemerintahan dan fungsi masyarakat (behavioral approach)

(fungsi masyarakat sbg Social Control dan Kohesivitas Sosial)

# KAJIAN SOSIOLOGI PEMERINTAHAN

soal

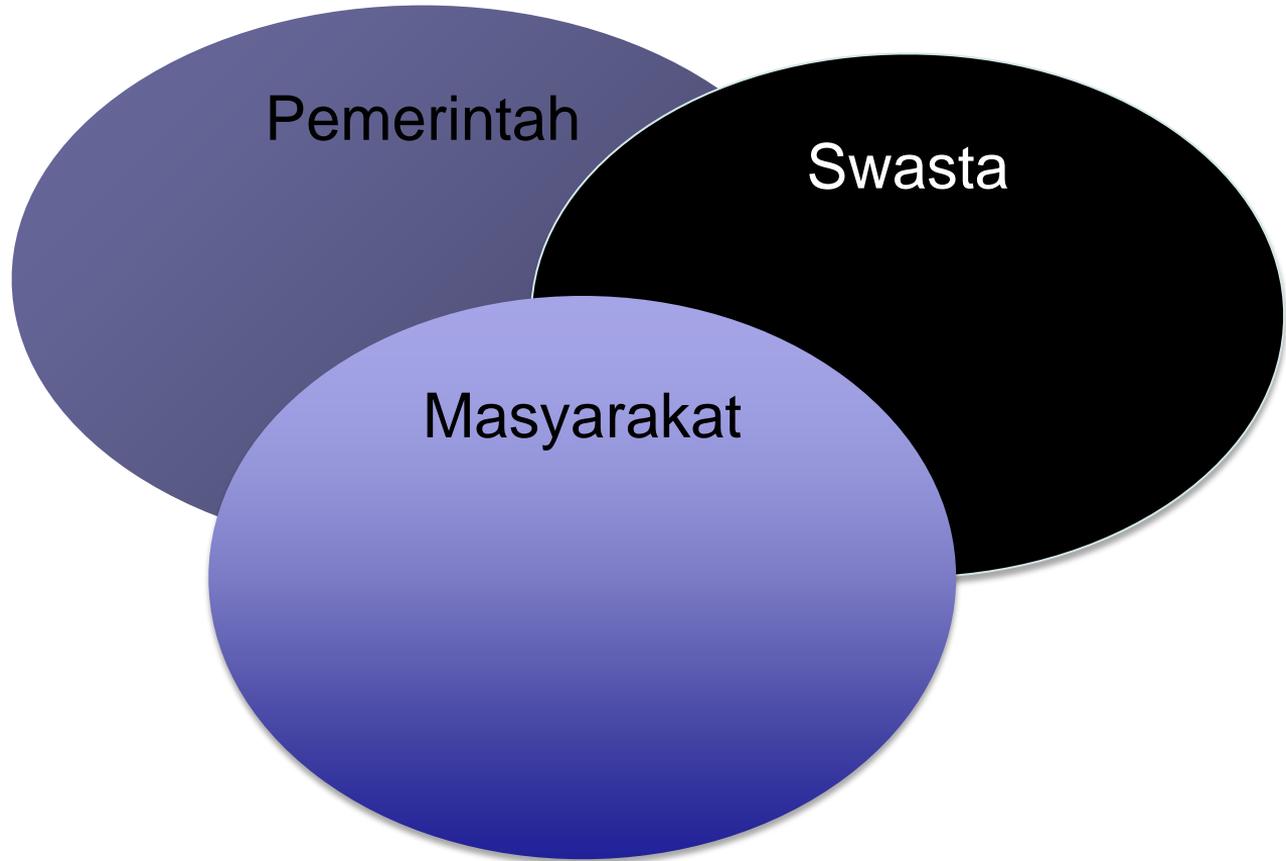


PERCAYA....

Salah satu subjek materi dari sosiologi pemerintahan adalah ttg Hubungan antara Pemerintah dan Masyarakat yang dibangun di atas sebuah Kepercayaan...

# Kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah

- Apa makna kepercayaan ....?



Pemerintah

Swasta

Masyarakat

# Kepercayaan Dalam Sebuah Sistem Sosial

soal

- Fukuyama (1997):

Ekspektasi yg timbul dalam komunitas akan perilaku Setiap anggota komunitasnya (jujur, tanggung jawab, kooperatif, dll),berdasarkan norma-norma yang dianut dan dipraktikan anggota dari komunitas itu. Kepercayaan juga memiliki nilai pragmatis yg amat penting.

Kepercayaan adalah minyak pelumas yg penting dalam sebuah sistem sosial.

Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat terbangun dengan cara apa....?

Kepercayaan pemerintah kepada masyarakat dapat terbangun dengan cara apa....?



**Kepercayaan** masyarakat dpt berimplikasi pada tumbuhnya pengakuan dan keyakinan masyarakat yg bermuara pada sikap dan perilaku masyarakat, yg ditunjukkan dalam bentuk dukungan, kepekaan, responsitas, ketaatan bahkan pengorbanan.

# Hubungan Pemerintah & Masyarakat



# Bangunan Hubungan Pemerintah dan Rakyat.....(1)

*Jean Jacques Rousseau dlm The Social Contract 1947*

Kontrak sosial bertujuan mengontrol kekuasaan yang dijalankan pemerintah oleh masyarakat. Kenyataan ini berdasarkan realitas bahwa kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah pada dasarnya adalah otoritas /kewenangan yang diberikan oleh rakyat yang diamanatkan melalui perjanjian sosial.

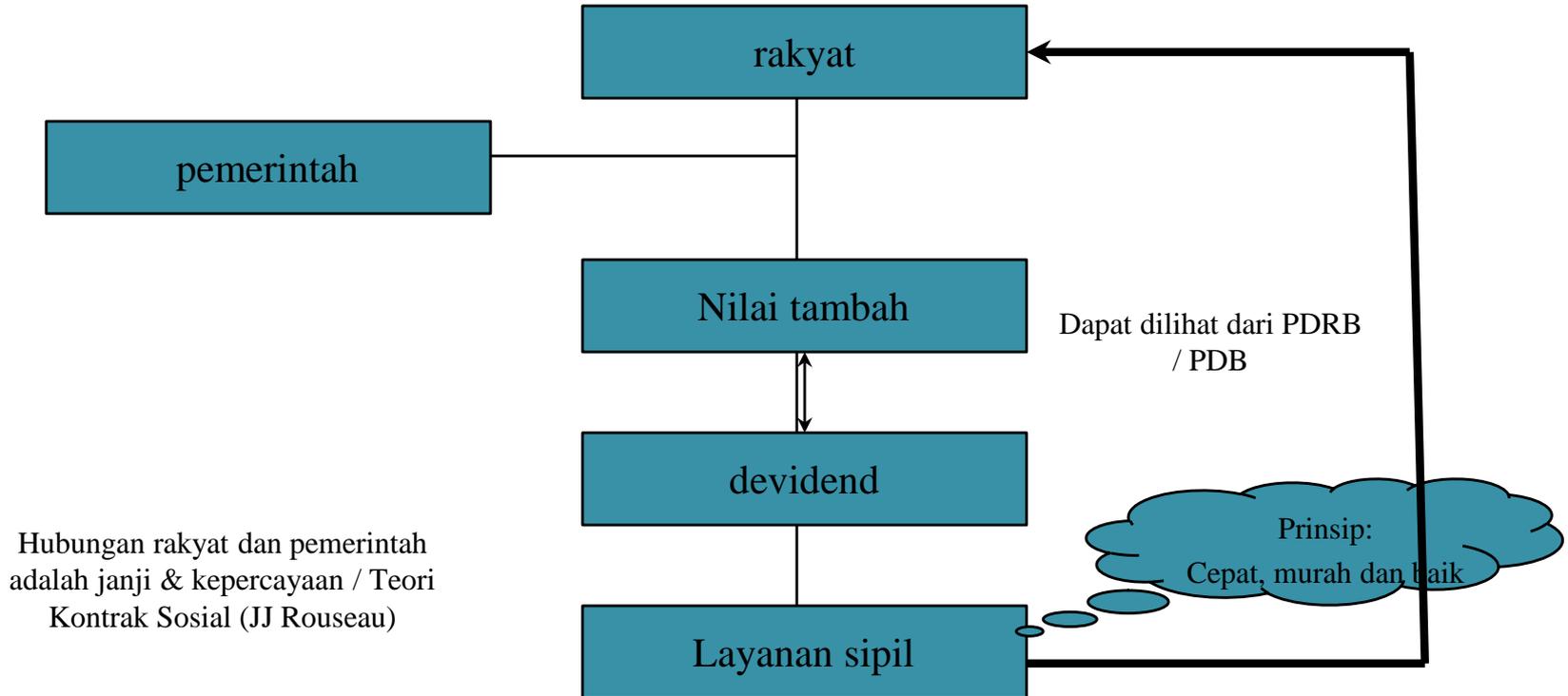


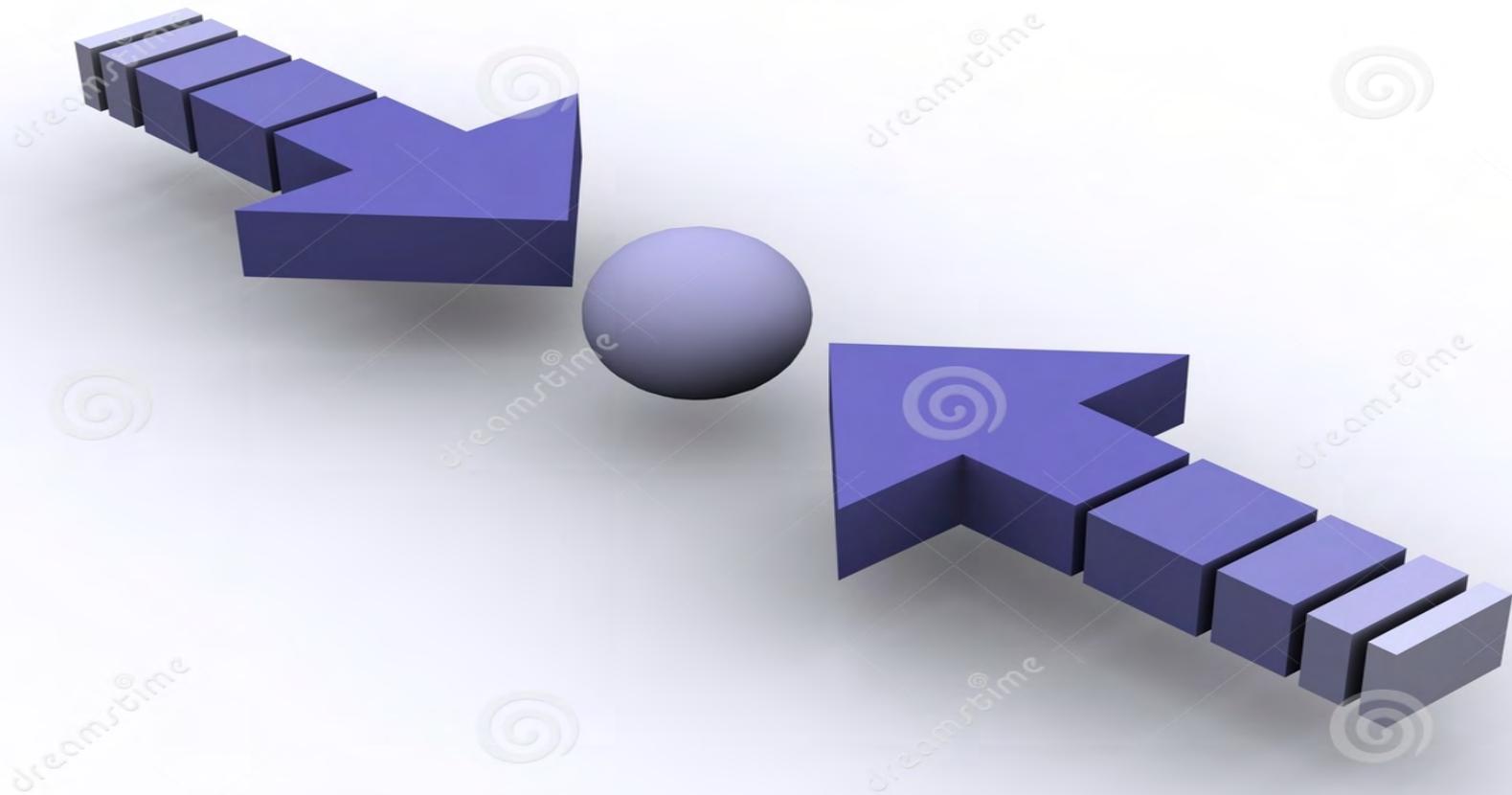
Oleh karena itu rakyat harus memperoleh manfaat yang lebih (deviden)

sesuai tujuan kontrak sosial itu dilakukan.

# Bangunan Hubungan Pemerintah dan Rakyat.....(2)

SOAL





Download from  
**Dreamstime.com**

This watermarked comp image is for previewing purposes only.



ID 2326783

© Pedro Tavares | Dreamstime.com

# Beberapa faktor yg dapat mempengaruhi kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah

1. Legitimasi Sosiologis

SOAL

2. Legalitas

3. Legitimasi Etis

Suseno:1991

# Beberapa faktor yg dapat mempengaruhi kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah

1. Legitimasi Sosiologis : terbagi menjadi 3 yaitu : legitimasi tradisional, karismatik dan rasional legal

Suseno:1991

Beberapa faktor yg dapat mempengaruhi kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah

2. Legalitas : keyakinan masyarakat bahwa keberadaan pemerintah/ pejabat berdasarkan hukum atau peraturan yg berlaku

Suseno:1991

# Beberapa faktor yg dapat mempengaruhi kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah

3. Legitimasi Etis: keyakinan masyarakat bahwa pemerintah/penguasa telah bertindak menurut norma-norma moral.

Suseno:1991

I'M FROM THE  
GOVERNMENT,  
I'M HERE  
TO HELP



Apakah  
pemerintah kita  
seperti ini ?





5`

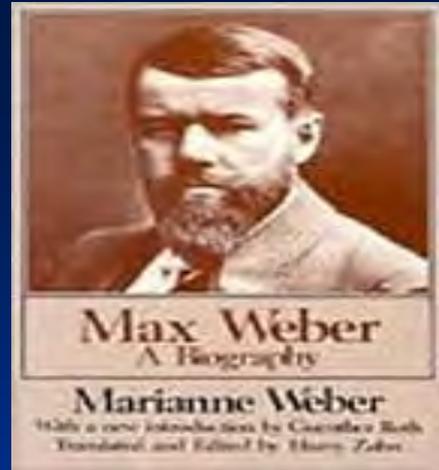
Upaya pemerintah utk mewujudkan tujuan negara pun dapat menjadi cerminan seberapa besar masyarakat percaya kepada kinerja pemerintahannya....menurut Suseno, pemerintah harus menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab sosial kepada msyarakat yg membutuhkannya.

# SOSIOLOGI BIROKRASI

# Konsep Birokrasi Publik

Konsep ini dikenalkan pertama kali oleh : Reiheer von Stein 1821 di Perancis dari kosa kata "buralist" kemudian menjadi "bureaucracy" yang pada perkembangannya ditandai dengan suatu lembaga pemerintah yang bekerja secara **rasional, impersonal dan legalistik (Inherent tendency & technical instrument)**

# Konsep Birokrasi Publik



- Max Weber : Birokrasi adalah sebuah sistem otorita yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai aturan. Birokrasi juga sebuah institusi pemerintah yang menekankan pada prinsip **hirarkhi, spesialisasi, prosedurisasi, dan impersonal.**

# Beberapa istilah dalam pembahasan birokrasi

- Patologi birokrasi
- Obesitas birokrasi
- Korupsi
- Egalitarian birokrasi  
(pemerintahan yg Humanis)
- Mewirausahkan birokrasi  
(reinventing government)
- New Public Administration (NPA)



**Sebanyak 290 kepala daerah sudah berstatus tersangka, terdakwa, dan terpidana. Sebagian besarnya (86,2%) terjerat kasus korupsi.**

Sumber : Gamawan Fauzi (tempo.co – 2013).

1. [Syamsul Arifin](#), Gubernur Sumatera Utara, terpidana kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kabupaten Langkat tahun 2000-2007
2. [Awang Faroek Ishak](#), Gubernur Kalimantan Timur, tersangka kasus divestasi saham PT Kaltim Prima Coal.
3. [Agusrin Najamudin](#), Gubernur Bengkulu, terpidana kasus korupsi pajak bumi dan bangunan serta bea penerimaan hak atas tanah dan bangunan Bengkulu tahun 2006-2007.
4. [Thaib Armaiyn](#), Gubernur Maluku Utara, tersangka kasus korupsi Dana Tak Terduga tahun 2004 dan APBD Provinsi Maluku Utara tahun 2007.
5. [Amran Batalipu](#), Bupati Buol, terdakwa kasus suap kepengurusan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit PT Hardaya Inti Plantations atau PT Cipta Cakra Murdaya 2011.
6. [Mochtar Muhammad](#), Wali Kota Bekasi, terpidana kasus suap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010.
7. [Sunaryo](#), Wakil Wali Kota Cirebon, terpidana kasus penyelewengan dana belanja barang dan jasa senilai Rp 4,9 miliar dalam APBD Kota Cirebon 2004.
8. [Eep Hidayat](#), Bupati Subang, terpidana kasus korupsi biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan senilai Rp 14 miliar tahun 2005-2008.
9. [Satono](#), Bupati Lampung Timur, terpidana kasus korupsi penggelapan dana rakyat dalam APBD sebesar Rp119 miliar dan menerima suap Rp 10,5 miliar dari pemilik Bank Perkreditan Rakyat, Tripanca Setiadana, pada 2005.
10. [Fauzi Siin](#), Bupati Kerinci, terpidana kasus suap dana APBN 2008.
11. [John Manuel Manoppo](#), Wali Kota Salatiga, tersangka kasus korupsi proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga.

# Membangun BIROKRASI Yang Humanis :

1. Egalitarian
2. Demokratis
3. Pro Public (Pro Poor)

# Sepuluh Prinsip

Good Governance

- 1** *Partisipasi.*
- 2** *Penegakan hukum.*
- 3** *Transparansi.*
- 4** *Kesetaraan.*
- 5** *Daya tanggap.*
- 6** *Wawasan ke depan.*
- 7** *Akuntabilitas.*
- 8** *Pengawasan.*
- 9** *Efisiensi & efektivitas.*
- 10** *Profesionalisme.*

**1** Bad Practices

**2** Usaha-Usaha

**3** Good Governance

**4** Good Management

**5** Sepuluh Prinsip

**6** Apa itu  
Demokrasi ?

# UPAYAYG DAPAT DILAKUKAN UNTUK OPTIMALISASI

- Reformasi Struktural / Kelembagaan
- Reformasi Kultural
- Reformasi Prosedural
- Reformasi Etika birokrasi Pemerintahan .

# UPAYA YG DAPAT DILAKUKAN

- **Reformasi Struktural / Kelembagaan**
  1. Menginventarisasi kembali fungsi – fungsi pemerintahan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat
  2. Rasionalisasi pegawai disesuaikan dengan kebutuhan
  3. Perampingan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan
  4. Mengembangkan konsep kaya fungsi ramping struktur
  5. Mengembangkan jabatan – jabatan fungsional dibandingkan dengan jabatan struktural
  6. Privatisasi dan swastanisasi lembaga – lembaga publik agar lebih efisien

# Reformasi Kultural

1. Menghapus mental dan budaya pangreh praja dan mental feodal dalam tubuh birokrasi
2. Membangun kesadaran yang rasional bahwa birokrasi harus profesional netral dan sejahtera (ASN UU No.5/2014)
3. Membangun kultur birokrasi yang tampil sebagai sosok pegawai yang memiliki dedikasi dan kualitas yang prima

## Reformasi Etika Birokrasi Pemerintahan .

- Mengembangkan etika pelayanan yang mendudukan masyarakat sebagai konsumen produk – produk pemerintahan
- mengembangkan etika birokrasi secara internal antara atasan dan bawahan yang rasional
- mengangkat budaya – budaya masyarakat yang memiliki nilai – nilai positif dalam mengembangkan nilai etika birokrasi



# POKOK POKOK ETIKA

DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA MENGEDEPANKAN KEJUJURAN, AMANAH, TELADAN, SPORTIFITAS, DISIPLIN, ETOS KERJA, KEMANDIRIAN, SIKAP TOLERANSI, RASA MALU, TANGGUNG JAWAB, MENJAGA KEHORMATAN, SERTA MARTABAT DIRI SEBAGAI WARGA BANGSA

# Reformasi Prosedural

1. Penyederhanaan prosedur kerja dan prosedur pelayanan
2. Membangun sistem kerja dan prosedur yang transparan
3. Menghilangkan prosedur yang berbelit – belit
4. Menerapkan electronic government untuk pembenahan prosedur layanan



# MEMBANGUN KOMITMENT UNTUK PERUBAHAN BAGI BIROKRASI



# MEMBANGUN KOMITMENT UNTUK PERUBAHAN BAGI BIROKRASI

1. DISAIN STRATEGIS PERUBAHAN
2. BERAWAL DARI SEBUAH KOMITMENT DARI PIMPINAN PUNCAK
3. MENGUBAH WAJAH BIROKRASI KEARAH PROFESIONAL, NETRAL DAN SEJAHTERA

# MEMBANGUN KOMITMENT UNTUK PERUBAHAN BAGI BIROKRASI

## 1. DISAIN STRATEGIS PERUBAHAN

- HARUS JELAS DAN KONKRIT PERUBAHAN YANG DIINGINKAN
- PERUBAHAN MERUPAKAN WIN-WIN SOLUTION
- MEMPERKECIL KORBAN AKIBAT PERUBAHAN
- PERUBAHAN HARUS DAPAT MENJAWAB DAN MEMPREDISKI KEBUTUHAN MASA YANG AKAN DATANG

## MEMBANGUN KOMITMENT UNTUK PERUBAHAN BAGI BIROKRASI

2. BERAWAL DARI SEBUAH KOMITMENT DARI PIMPINAN PUNCAK.

- A. PERUBAHAN HARUS DIMULAI DARI PIMPINAN PUNCAK.
- B. KOMITMENT YANG DIBANGUN HARUS DIJELASKAN SECARA TERBUKA DAN MENYELURUH
- C. DIBUTUHKAN KONSISTENSI DAN INTEGRITAS DIRI SEORANG PIMPINAN UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN KE ARAH YANG LEBIH BAIK.



# MEMBANGUN KOMITMENT UNTUK PERUBAHAN BAGI BIROKRASI

## 3. MENGUBAH WAJAH BIROKRASI KEARAH PROFESIONAL, NETRAL DAN SEJAHTERA.

- PROFESIONAL DIARTIKAN SEBAGAI KEMAMPUAN YANG DIMILIKI SESUAI DENGAN KUALIFIKASI YANG DIBUTUHKAN.
- NETRAL DIARTIKAN BAHWA BIROKRASI TIDAK DIKUTSERTAKAN DAN DIPOLITISASI KE DALAM KEPENTINGAN KELOMPOK, PARTAI DALAM BENTUK APAPUN
- SEJAHTERA ADALAH JAMINAN KEHIDUPAN BIROKRASI HARUS MEMENUHI STANDAR HIDUP YANG MEMADAI

# LINGKUP MASALAH BIROKRASI

1. Jumlah Birokrasi yang sangat besar
2. Kurangnya/belum optimalnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki
3. Kelembagaan yang tidak efisien
4. Pola karier yang belum jelas
5. Pola rekrutment yang tidak sesuai dengan kebutuhan
6. Tingkat kesejahteraan yang kurang memadai



# Soal Kuis

## Sosiologi Pemerintahan

- Melihat kondisi eksisting birokrasi saat ini, menurut anda perilaku apa saja yg dapat dikategorikan sebagai patologi birokrasi ?
- Bagaimana rencana strategis yg akan dilakukan untuk "mengobati" patologi tsb dan bagaimana peran masyarakat dlam hal ini ?



Terima Kasih